



## Pemkab Sintang Raih WTP Kali Ketujuh

# Bupati: Bukan Berarti Tak Terjadi Penyalahgunaan Anggaran



**SINTANG-RK.** Pemkab Sintang menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk kali ke-7. Dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan tahun anggaran 2018 dari Menteri Keuangan, Rabu (16/10).

Penghargaan diterima langsung Bupati Jarot Winarno. Yang menyerahkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalbar, Edih Mulyadi, di ruang kerja Bupati Sintang.

"Kita sebagai pemerintah daerah sangat bersyukur atas penghargaan WTP dari ibu Menteri Keuangan ini, mudah-mudahan ini akan terus kita pertahankan kedepannya," ujar Jarot.

Meskipun demikian, ia melanjutkan, mendapatkan WTP bukan berarti dalam prosesnya tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Sehingga tetap selalu menjadi kehati-hatian pemerintah daerah dalam mengelolanya.

Menurut Jarot, dalam setiap audit reguler dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sering muncul permasalahan yang sama. Terkait aset daerah, piutang, dan dana BOS.

Secara khusus, dana BOS, ia menjelaskan, yang selalu jadi permasalahan. Karena langsung ditransfer dari pusat ke rekening ke-



**WTP.** Bupati Jarot Winarno menerima penghargaan WTP di kantornya, Rabu (16/10). *Humas Pemkab for RK*

pala sekolah, sehingga komunikasi sangat susah.

"Selanjutnya juga temuan-temuan pada proyek pembangunan, puncaknya tahun 2018 lalu, karena ada dana DAK yang kita kembalikan 75 persen, performance dari mereka pemorong hanya mampu mengelola 25 persen saja," beber Jarot.

Pihaknya menghentikan project bangunan Puskesmas Ketungau Hilir. Disadari, meskipun Pemda dirugikan karena DAK itu, kalau sudah dikembalikan tidak bisa dibalikkan lagi ke Pemda. Tapi yang penting negara tidak boleh dirugikan.

"Jadi sampai sekarang bangunannya agak terbengkalai, kemung-

kinan untuk kelanjutannya nanti akan menggunakan dana DAU," terangnya.

Jarot menjelaskan, Sintang menjadi kabupaten pertama yang berani melakukan lelang dua paket pada 14 Januari 2019 lalu. Namun selanjutnya agak sedikit macet karena ada perubahan versi. Perubahan versi itu menyebabkan pengelola proyek pembangun harus dilatih juga. Selain itu, karena adanya proses pelaksanaan Pilpres kemarin.

"Alhamdulillah seluruh dana DAK berhasil kita lelangkan, meskipun presentasi dari dana DAK kecil, mudah-mudahan bisa tertutup dengan realisasi kegiatan yang lain,"

tutupnya.

Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Edih Mulyadi, mengatakan Menteri Keuangan menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Sintang. Telah berhasil kembali meraih WTP ketujuh kalinya. Namun demikian, ia menegaskan, WTP bukan akhir dan bukan sesuatu yang menjamin Pemda lepas dari hal yang bersifat penyelewengan.

"Tapi WTP ini suatu pencapaian yang luar biasa, tentu prestasi ini harus dipertahankan di kemudian hari," pintanya.

Selaku Bendaharawan Umum Negara, pihaknya punya kewajiban untuk memastikan pengelolaan keuangan negara. Baik yang dilakukan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Semua harus berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

"Terkait DAU, DAK dan Dana Desa, yang menjadi perhatian adalah tanggal 21 Oktober nanti, karena batas upload dokumen sebagai syarat pencairan tahap kedua DAK fisik," tuturnya.

Ia berterima kasih atas informasi yang di sampaikan Bupati Sintang, yakni tinggal proses penyelesaian pemeriksaan oleh inspektorat daerah. "Mudah-mudahan tidak mentok di tanggal 21 itu ya, saya berharap sebelum tanggal itu bisa diselesaikan," pungkas Edih. **(pul)**